

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI (401369)

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2025 (Unaudited)



PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 52

Telp.0858 - 424325 BANYUWANGI- 68419

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52

Banyuwangi - Jawa Timur 68416

Telp. 0333424325 Fax. 0333412420

Web : pa-banyuwangi.go.id, e-mail : pabanyuwangi@gmail.com



**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025
(UNAUDITED)**

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52

Telp. 0333424325 Fax. 0333412420

Surabaya - Jawa Timur 68416

e-mail : pabanyuwangi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Banyuwangi adalah salah satu Entitas Akuntansi di yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banyuwangi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banyuwangi, 10 Februari 2026
Sekretaris
Pengadilan Agama Banyuwangi,

HO H E H
NIP. 19721214 1994031 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
RINGKASAN	ix
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	xi
NERACA	xii
LAPORAN OPERASIONAL	xiii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xiv
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banyuwangi	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	4
A.4. Basis Akuntansi	5
A.5. Dasar Pengukuran	5
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	13
B.1 Pendapatan	13
B.2 Belanja.....	14
B.3 Belanja Pegawai	16
B.4 Belanja Barang	17
B.5 Belanja Modal	18
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19
B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	19
B.5.3 Belanja Modal Lainnya	19
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	20

C.1. Aset Lancar	20
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	20
C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	20
C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	21
C.1.4. Piutang Bukan Pajak.....	21
C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	22
C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	23
C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	23
C.1.8. Persediaan.....	24
C.2. Aset Tetap	24
C.2.1. Tanah.....	25
C.2.2. Peralatan dan Mesin	29
C.2.3. Gedung dan Bangunan.....	29
C.2.4. Aset Tetap Lainnya	30
C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan	31
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	31
C.3. Aset Lainnya	32
C.3.1. Aset Tak Berwujud	33
C.3.3. Aset Lain–Lain	33
C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	34
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	34
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga	34
C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan.....	35
C.4.4. Pendapatan Diterima di Muka	35
C.4.5. Uang Muka dari KPPN	36
C.4.6. Utang Jangka Pendek Lainnya.....	36
C.5 Ekuitas.....	36
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	37

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	37
D.2 Beban Pegawai.....	37
D.3 Beban Persediaan	38
D.4 Beban Barang dan Jasa	39
D.5 Beban Pemeliharaan.....	40
D.6 Beban Perjalanan Dinas	40
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	41
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	41
D.9 Kegiatan Non Operasional	42
D.10 Pos Luar Biasa	42
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	43
E.1 Ekuitas Awal	43
E.2 Surplus/Defisit LO.....	43
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi.....	43
E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset	43
E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan	43
E.5 Transaksi Antar Entitas.....	44
E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	44
E.6 Ekuitas Akhir.....	44
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	45
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	45
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	45
F.3. Pengungkapan Lain-Lain.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	13
Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN Per 31 Desember 2025 dan 2024	14
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2025	15
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024	16
Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	16
Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	17
Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	18
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	19
Tabel 11. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	20
Tabel 12. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	20
Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	21
Tabel 14. Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	21
Tabel 15. Rincian Penyetoran Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025	22
Tabel 14. Mutasi Piutang Bukan Pajak	22
Tabel 17. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 ...	23
Tabel 18. Rincian Jumlah Debitur dan Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	23
Tabel 19. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2025	24
Tabel 18. Rincian Persediaan	24
Tabel 19. Rincian Persediaan	24
Tabel 21. Mutasi Transaksi Tanah	25
Tabel 22. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2025	26
Tabel 23. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin	29
Tabel 24. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan	29
Tabel 25. Mutasi Aset Tetap Lainnya	30
Tabel 26. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	31
Tabel 27. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	32
Tabel 27. Rincian Aset Lainnya	32
Tabel 25. Mutasi Aset Tetap Lainnya	32
Tabel 28. Mutasi Aset Tak Berwujud	33
Tabel 29. Mutasi Aset Lain-Lain	34

Tabel 30. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya..... 34

Tabel 31. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga..... 35

Tabel 31. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga..... 35

Tabel 32. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka..... 36

Tabel 32. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka..... 36

Tabel 33. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 31 Desember 2025 dan 2024 37

Tabel 34. Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024..... 37

Tabel 35. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.. 38

Tabel 36. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024..... 39

Tabel 37. Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024..... 40

Tabel 38. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 40

Tabel 39. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024..... 41

Tabel 40. Rincian Beban Piutang tak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 2024 41

Tabel 41. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024..... 42

Tabel 43. Rincian Transaksi Antar Entitas..... 44

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat - Instansi Pusat 10010

Telp. 021-3843348 Fax. 021-3446948 e-mail: deskinfo@mahkamahagung.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banyuwangi Tahunan Tahun 2025 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banyuwangi telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banyuwangi, 10 Februari 2026
Sekretaris
Pengadilan Agama Banyuwangi,

S H O H E H
NIP. 19721214 1994031 001



RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banyuwangi Tahunan Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp12.866.853,00 atau mencapai 630,11% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.042.000,00.

Realisasi Belanja Negara Tahunan Tahun 2025 adalah sebesar Rp8.796.749.429,00 atau mencapai 98,99% dari alokasi anggaran sebesar Rp8.888.787.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp25.582.244.752,00, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp25.582.244.752,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp24.067.264.262,00 dan Rp25.582.244.752,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.368.800,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp10.794.967.101,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp10.789.598.301,00), Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos- Pos Luar Biasa

masing-masing sebesar Rp7.498.053,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar (Rp10.782.100.248,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp26.020.932.434,00 dikurangi defisit-LO sebesar (Rp10.782.100.248,00), ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar (Rp0,00), kemudian ditambah dengan koreksi lain-lain sebesar (Rp0,00) dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.828.432.076,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp24.067.264.262,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025			31 DESEMBER 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN	B.1						
Pendapatan	B.1	2.042.000,00	12.866.853,00	630,11	1.454.000,00	3.965.300,00	272,72
Jumlah Pendapatan		2.042.000,00	12.866.853,00	630	1.454.000,00	3.965.300,00	273
BELANJA	B.2						
Belanja Pegawai	B.3	7.145.658.000,00	7.063.967.730,00	98,86	7.239.406.000,00	7.186.626.152,00	99,27
Belanja Barang	B.4	1.741.129.000,00	1.732.781.699,00	99,52	2.047.780.000,00	2.025.699.133,00	98,92
Belanja Modal	B.5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	99,76
Jumlah Belanja		8.886.787.000,00	8.796.749.429,00	99	9.287.186.000,00	9.212.325.285,00	99

NERACA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
ASET			
Aset Lancar	C. 1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.1	-	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C. 1.2	-	0,00
Piutang Bukan Pajak	C. 1.3	-	0,00
Persediaan	C. 1.4	-	0,00
Jumlah Aset Lancar		0,00	0,00
Aset Tetap	C. 2		
Tanah	C. 2.1	12.489.065.000,00	12.489.065.000,00
Peralatan dan Mesin	C. 2.2	2.882.005.018,00	3.029.119.018,00
Gedung dan Bangunan	C. 2.3	14.965.437.146,00	14.965.437.146,00
Aset Tetap Lainnya	C. 2.4	1.939.309,00	1.939.309,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	C. 2.5	(4.756.201.721,00)	(4.451.995.703,00)
Jumlah Aset Tetap		25.582.244.752,00	26.033.564.770,00
ASET LAINNYA	C. 3		
Aset Tak Berwujud	C. 3.1	-	-
Aset Lain-Lain	C. 3.2	-	255.117.400,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 3.3	0,	(255.117.400,00)
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET		25.582.244.752,00	26.033.564.770,00
Kewajiban Jangka Pendek	C. 4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 4.1	1.514.980.490,00	12.632.336,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C. 4.2	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 4.3	-	-
Uang Muka dari KPPN	C. 4.5	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.514.980.490,00	12.632.336,00
JUMLAH KEWAJIBAN		1.514.980.490,00	12.632.336,00
EKUITAS			
Ekuitas	C. 5	24.067.264.262,00	26.020.932.434,00
JUMLAH EKUITAS		24.067.264.262,00	26.020.932.434,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		25.582.244.752,00	26.033.564.770,00

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	D. 1	5.368.800,00	3.965.300,00
JUMLAH PENDAPATAN		5.368.800,00	3.965.300,00
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	8.549.313.814,00	7.186.874.307,00
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	41.021.000,00	33.159.000,00
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	1.102.593.989,00	1.316.614.456,00
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	581.574.817,00	626.342.773,00
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	24.593.963,00	48.928.000,00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	495.869.518,00	509.158.180,00
JUMLAH BEBAN		10.794.967.101,00	9.721.076.716,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(10.789.598.301,00)	(9.717.111.416,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E. 1	7.498.053,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E. 2	0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		7.498.053,00	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		7.498.053,00	-
POS LUAR BIASA	D. 10	0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) LO		(10.782.100.248,00)	(9.717.111.416,00)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	26.020.932.434,00	35.897.507.798,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(10.782.100.248,00)	(9.717.111.416,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4.1	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4.2	0,00	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 4.3	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	E. 4.4	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 4.5	0,00	(40.114.959,00)
Lain-lain	E. 4.6	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 5	828.432.076,00	(119.348.989,00)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.953.668.172,00)	(9.876.575.364,00)
EKUITAS AKHIR	E. 6	24.067.264.262,00	26.020.932.434,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**A. PENJELASAN UMUM****A.1. Dasar Hukum**

- Dasar Hukum*
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2023 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
22. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akreal dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banyuwangi

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Agama
Banyuwangi*

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyuwangi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyuwangi Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyuwangi Mahkamah Agung Tahun 2015-2019, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, dan juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Agama Banyuwangi Mahkamah Agung menetapkan visi sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”.

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Agama Banyuwangi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi Pengadilan Agama Banyuwangi Mahkamah Agung yang mengelola *man*, *money*, dan *material* Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya mempunyai peran yang sangat penting mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
2. Pengadilan Agama Banyuwangi mempunyai peranan utama dalam membangun opini Mahkamah Agung khususnya dibidang pelaporan keuangan dan aset;
3. Pengadilan Agama Banyuwangi Mahkamah Agung disamping mempunyai fungsi melakukan koordinasi, pembinaan dan juga pelaksanaan perencanaan pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di semua lingkungan peradilan, serta kehumasan keprotokolan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Misi Pengadilan Agama Banyuwangi Mahkamah Agung ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi:

1. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana dan lain-lain;
2. Adanya Kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran, dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan Peradilan;
3. Adanya dukungan dari berbagai pihak (termasuk luar negeri/lembaga donor).

Misi Pengadilan Agama Banyuwangi:

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran;
2. Meningkatkan kelembagaan/organisasi dan tata laksana peradilan yang efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai;
5. Meningkatkan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan;
6. Meningkatkan penatausahaan aset negara;

7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan profesional.

Tujuan

Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan maka tujuan yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah:

1. Terwujudnya dukungan *man, money, dan material* atas tugas fungsi utama Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
2. Terlaksananya layanan rumah tangga Mahkamah Agung sesuai dengan indikator tujuan.

Sasaran Strategis

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi, Pengadilan Agama Banyuwangi menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan;
2. Meningkatkan layanan perencanaan, keuangan, dan BMN yang akuntabel;
3. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
4. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem *single entry point, single database, multi user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul Akuntansi dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.4. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi Pengadilan Agama Banyuwangi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan

Agama Banyuwangi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Banyuwangi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banyuwangi adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

*Pendapatan-
LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

*Pendapatan-
LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Banyuwangi adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;

(5) Aset

Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Aset Lancar*
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	
--	---	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya;

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Pengadilan Agama Banyuwangi Tahunan Tahun 2025 mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp8.886.787.000,00. Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Rincian Perubahan DIPA

Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	PER 30 JUNI 2025	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.042.000,00	2.042.000,00
Jumlah Pendapatan	2.042.000,00	2.042.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	7.104.078.000,00	7.145.658.000,00
Belanja Barang	1.707.256.000,00	1.741.129.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Jumlah Belanja	8.811.334.000,00	8.886.787.000,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar
Pendapatan Rp12.866.853,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.042.000,00.
Rp12.866.853,00 Pendapatan Pengadilan Agama Banyuwangi terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan
0 Pengelolaan BMN serta Pendapatan Lain-Lain.

Adapun rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	PER 31 DESEMBER 2025		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	2.042.000,00	12.866.853,00	630,11
4259	Pendapatan Lain-Lain	0,00	-	100,00
Jumlah Pendapatan Bruto		2.042.000,00	12.866.853,00	630,11
Pengembalian		0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		2.042.000,00	12.866.853,00	630,11

Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.824.853,00 atau 630,11% dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya Pendapatan Lain-lain seperti pendapatan pengembalian belanja pegawai dan barang. Meskipun secara umum Pendapatan Bukan Pajak Lainnya mengalami penurunan, namun terdapat kenaikan pada realisasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan karena adanya penambahan pemanfaatan rumah dinas Pengadilan Agama Banyuwangi.

Perbandingan realisasi PNBP 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

KODE	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	12.866.853,00	3.965.300,00	(3.965.300,00)	(100,00)
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	-	3.965.300,00	(3.965.300,00)	(100,00)
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	12.866.853,00	0,00	12.866.853,00	100,00
4259	Pendapatan Lain-Lain	-	-	-	#DIV/0!
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	0,
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		12.866.853,00	3.965.300,00	8.901.553,00	224,49
Pengembalian		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		12.866.853,00	3.965.300,00	8.901.553,00	224,49

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Realisasi Belanja Pengadilan Agama Banyuwangi pada periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.796.749.429,00 atau 98,99% dari anggaran belanja sebesar Rp8.886.787.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	7.145.658.000,00	7.063.967.730,00	98,86
52	Belanja Barang	1.741.129.000,00	1.732.781.699,00	99,52
53	Belanja Modal	-	109.500.000,00	0,00
Jumlah Belanja Transaksi Kas Bruto		8.886.787.000,00	8.906.249.429,00	100,22
Pengembalian		0,00	-	0,00
Jumlah Belanja Transaksi Kas Netto		8.886.787.000,00	8.906.249.429,00	100,22

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp525.075.856,00 atau sebesar 5,63% dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

- Belanja Pegawai
Menurunnya Belanja Pegawai dalam Efisiensi Anggaran.
- Belanja Barang

Menurunnya Belanja Barang dikarenakan kondisi penghematan/efisiensi anggaran.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	7.063.967.730,00	7.186.626.152,00	(122.658.422,00)	(1,71)
52	Belanja Barang	1.732.781.699,00	2.025.699.133,00	(292.917.434,00)	(14,46)
53	Belanja Modal	-	109.500.000,00	(109.500.000,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Transaksi Kas		8.796.749.429,00	9.321.825.285,00	(525.075.856,00)	(5,63)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp7.063.967.730,00.

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.063.967.730,00 dan Rp7.186.626.152,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp5.943.427.715,00 atau 20,73% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2023. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.034.089.020,00	2.332.497.420,00	(298.408.400,00)	(12,79)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.094,00	28.611,00	(4.517,00)	(15,79)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	174.384.620,00	194.487.114,00	(20.102.494,00)	(10,34)
Belanja Tunj. Anak PNS	53.938.029,00	59.879.526,00	(5.941.497,00)	(9,92)
Belanja Tunj. Struktural PNS	40.860.000,00	40.320.000,00	540.000,00	1,34
Belanja Tunj. Fungsional PNS	78.685.000,00	3.534.700.000,00	(3.456.015.000,00)	(97,77)
Belanja Tunj. PPh PNS	11.035.083,00	573.870.205,00	(562.835.122,00)	(98,08)
Belanja Tunj. Beras PNS	107.978.220,00	118.189.440,00	(10.211.220,00)	(8,64)
Belanja Uang Makan PNS	271.706.000,00	311.885.000,00	(40.179.000,00)	(12,88)
Belanja Tunjangan Umum PNS	21.735.000,00	20.770.000,00	965.000,00	4,65
Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	621.554.278,00	0,00	621.554.278,00	100,00
Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	3.352.100.000,00	0,00	3.352.100.000,00	100,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	205.753.600,00	0,00	205.753.600,00	100,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.620,00	0,00	4.620,00	100,00
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	16.141.200,00	0,00	16.141.200,00	100,00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	4.773.000,00	0,00	4.773.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	13.120.000,00	0,00	13.120.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	15.353.040,00	0,00	15.353.040,00	100,00
Belanja Uang Makan PPPK	40.918.000,00	0,00	40.918.000,00	100,00
Realisasi Belanja Bruto	7.064.152.804,00	7.187.199.222,00	(123.046.418,00)	(1,71)
Pengembalian	(185.074,00)	(573.070,00)	387.996,00	(67,70)
Realisasi Belanja Netto	7.063.967.730,00	7.186.626.152,00	(122.658.422,00)	(1,71)

Kenaikan realisasi belanja pegawai secara umum disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. penambahan jumlah pegawai yang berasal dari mutasi masuk pegawai, penerimaan CPNS Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2025;
2. pembayaran kekurangan tunjangan kinerja beberapa pegawai akibat ada perubahan SK KMA 260 Tahun 2025;
3. pembayaran kekurangan gaji hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pembayaran Tunjangan Kinerja THR dan Gaji Ketiga Belas menjadi sebesar 100%.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Rp1.732.781.699,00 Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.732.781.699,00 dan Rp2.025.699.133,00. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar (Rp22.080.867,00) atau (6,73%) dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2024.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	988.757.260,00	1.178.574.488,00	(189.817.228,00)	(16,11)
Belanja Barang Non Operasional	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	#DIV/0!
Belanja Barang Persediaan	62.548.000,00	33.159.000,00	29.389.000,00	88,63
Belanja Jasa	95.834.659,00	138.694.872,00	(42.860.213,00)	(30,90)
Belanja Pemeliharaan	560.047.817,00	626.342.773,00	(66.294.956,00)	(10,58)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	24.593.963,00	48.928.000,00	(24.334.037,00)	(49,73)
Realisasi Belanja Bruto	1.732.781.699,00	2.025.699.133,00	(292.917.434,00)	(14,46)
Pengembalian	-	-	-	#DIV/0!
Realisasi Belanja Netto	1.732.781.699,00	2.025.699.133,00	(292.917.434,00)	(14,46)

Penurunan realisasi Belanja Barang disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. terdapat efisiensi anggaran atas instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025;
2. perubahan rencana kegiatan akibat efisiensi tersebut;
3. penurunan frekuensi perjalan dinas pimpinan.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp109.500.000,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp 109.500.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2024. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	109.500.000,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Bruto	-	109.500.000,00	(109.500.000,00)	(100,00)
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Netto	-	109.500.000,00	(109.500.000,00)	(100,00)

Penurunan realisasi Belanja Modal disebabkan oleh tidak ada pagu belanja modal di TA 2025.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0,00 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp109.500.000,00. Terdapat penurunan atas realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	109500000,00	-109.500.000,00	0,00
Realisasi Belanja Bruto	-	109500000,00	-109500000,00	0,00
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Netto	-	109500000,00	-109500000,00	0,00

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0,00 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak mengalami penurunan maupun kenaikan karena tidak ada pagu anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun anggaran 2024.

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp0,00 Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak mengalami penurunan maupun kenaikan karena tidak ada pagu anggaran Belanja Modal lainnya pada tahun anggaran 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar
Rp0,00

Jumlah Aset Lancar Satuan Kerja Pengadilan Agama Banyuwangi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 9. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Saldo UP	0,00	0,00
2	Kwitansi UP belum di SPJ-kan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0,00

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, Kas Lainnya dan Setara Kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 10. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
1		0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

Belanja Dibayar

Dimuka **C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)**

(Prepaid)

Rp0,00

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 tidak terjadi penurunan maupun kenaikan pada periode 31 Desember 2025.

Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) pada Pengadilan Agama Banyuwangi pada 31 Desember 2024 merupakan pembayaran dimuka atas barang/jasa berupa sewa kendaraan dinas yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.

Tabel 11. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	NIHIL		
JUMLAH		0	-

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak *Rp0,00*

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

Tabel 12. Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Sewa Rumah Dinas yang dipotong melalui SPM gaji	-	0,00
JUMLAH		0,00	0,00

Tabel 13. Rincian Penyetoran Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Nilai Piutang Bukan Pajak	Bukti Setor		
			Nilai Setoran	Tanggal Dokumen	NTPN
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak					
1	Sewa Kantin Medan Merdeka Utara dan Ahmad Yani	0,00	-	-	-
Jumlah Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak		0,00			
Piutang Lainnya					
1	Sewa Rumah Dinas yang dipotong melalui SPM gaji	1.423.550	-	-	-
Jumlah Piutang Lainnya		1.423.550,00			
Jumlah		1.423.550,00			

Mutasi saldo Piutang Bukan Pajak pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Mutasi Piutang Bukan Pajak

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi Tambah:	
Piutang Lainnya	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
Piutang PNPB	-
Piutang Lainnya	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Penjelasan mutasi saldo Piutang Bukan Pajak pada periode 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Tambah

Tidak terdapat mutasi tambah pada saldo Piutang Pajak periode 31 Desember 2025

b. Mutasi Kurang

Tidak terdapat mutasi kurang pada saldo Piutang Pajak periode 31 Desember 2025

C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp0,00 Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 15. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1					
Total					0,00

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Rp0,00. Bagian Lancar pada Pengadilan Agama Banyuwangi berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 16. Rincian Jumlah Debitur dan Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

(dalam Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar
1	-	-	0,00

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Rp0,00. Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar (Rp0,00) dan sebesar (Rp0,00). Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang pada periode tahun 2024. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Rugi (TGR)

(Rp0,00)

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 17. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	-	-	-	0,005	-

C.1.8. Persediaan

Persediaan
Rp0,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	Mutasi	31 Desember 2024
1	Barang Konsumsi	-	-	-
Jumlah		-	-	-

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp25.582.244.752,00

Nilai Aset Tetap Pengadilan Agama Banyuwangi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp25.582.244.752,00 dan Rp26.033.564.770,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Pengadilan Agama Banyuwangi berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	Mutasi	31 Desember 2024
1	Tanah	12.489.065.000,00	-	12.489.065.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2.882.005.018,00	(147.114.000)	3.029.119.018,00
3	Gedung dan Bangunan	14.965.437.146,00	-	14.965.437.146,00
4	Aset Tetap Lainnya	1.939.309,00	-	1.939.309,00
5	AKUMULASI PENYUSUTAN	(4.756.201.721,00)	304.206.018	(4.451.995.703,00)
Jumlah		25.582.244.752,00	157.092.018,00	26.033.564.770,00

C.2.1. Tanah

Tanah Rp12.489.065.000,00 Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Banyuwangi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.489.065.000,00 dan Rp12.489.065.000,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Tahun 2024.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 20. Mutasi Transaksi Tanah

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	12.489.065.000,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2025	12.489.065.000,00

Tabel 21. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2025

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1	Hak Pakai No 12371604, 17 Desember 1990	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Banyuwangi	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	4.870	12.143.275.000,00
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	Hak Pakai No 12371617, 13 Januari 2017	Jl. Candi Jawi No. 23 Banyuwangi	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	235	319.678.000,00
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	Hak Pakai No 12370000,	Jl. Kalingga No. 17 Banyuwangi	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	208	26.112.000,00
Jumlah Halaman I					5.313	12.489.065.000,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp2.882.005.018,00

Peralatan dan Mesin merupakan bagian dari aset tetap yang mencakup berbagai jenis mesin, peralatan baik TIK maupun Non TIK, dan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan operasional. Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pengadilan Agama Banyuwangi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.882.005.018,00 dan Rp3.029.119.018,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 22. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	3.029.119.018,00
Nihil	-
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Penghapusan	(147.114.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(147.114.000,00)
Jumlah Mutasi	(147.114.000,00)
Saldo per 31 Desember 2025	2.882.005.018,00
Akumulasi Penyusutan	(2.488.102.138,00)
Nilai Buku	393.902.880,00

Mutasi kurang yang terjadi pada Peralatan dan Mesin satuan kerja Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu penghapusan Peralatan dan Mesin satuan kerja Pengadilan Agama Banyuwangi.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp14.965.437.146,00

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pengadilan Agama Banyuwangi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.965.437.146,00 dan Rp14.965.437.146,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 23. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	14.965.437.146,00
Nihil	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Nihil	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	14.965.437.146,00
Akumulasi Penyusutan	(2.017.380.480,00)
Nilai Buku	12.948.056.666,00

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang terhadap aset Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Agama Banyuwangi antara lain:

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp1.939.309,00 dan Rp1.939.309,00.

Rp1.939.309,00 Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada periode 31 Desember 2025.

Tabel 24. Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	1.939.309,00
Nihil	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Nihil	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	1.939.309,00
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	1.939.309,00

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,00 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan Gedung Bangunan pada Satuan Kerja di Pengadilan Agama Banyuwangi yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal pelaporan, disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 25. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	-
Perolehan KDP	-
Pengembangan KDP	-
Perolehan Lainnya KDP	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang KDP pada periode 31 Desember 2025.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp4.756.201.721,00) Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp4.756.201.721,00) dan (Rp4.451.995.703,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 26. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.882.005.018,00	(2.584.983.411,00)	297.021.607,00
2	Gedung dan Bangunan	14.965.437.146,00	(2.171.218.310,00)	12.794.218.836,00
3	Aset Tetap Lainnya	1.939.309,00	0,00	1.939.309,00
Jumlah		17.849.381.473,00	(4.756.201.721,00)	13.093.179.752,00

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp0,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Pengadilan Agama Banyuwangi terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Rincian Aset Lainnya periode 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 27. Rincian Aset Lainnya*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	1.939.309,00	(1.939.309,00)	0,00
2	Aset Lain-lain			0,00
Jumlah		1.939.309,00	(1.939.309,00)	0,00

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada periode 31 Desember 2025.

Tabel 28. Mutasi Aset Tetap Lainnya*(dalam Rupiah)*

Saldo per 31 Desember 2024	-
Nihil	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Nihil	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp0,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Pengadilan Agama Banyuwangi berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Tak Berwujud pada periode 31 Desember 2025.

Tabel 29. Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	-
-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Amortisasi	-
Nilai Buku	-

C.3.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp255.117.400,00.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Agama Banyuwangi serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Lain-lain pada periode Tahunan Tahun 2024.

Tabel 30. Mutasi Aset Lain-Lain

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	255.117.400,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Perubahan Kondisi	(255.117.400,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(255.117.400,00)
Jumlah Mutasi	0,
Saldo per 31 Desember 2025	255.117.400,00
Akumulasi Penyusutan	(255.117.400,00)
Nilai Buku	-

C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp0,00)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp0,00) dan (Rp255.117.400,00). Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 31. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset yang tidak digunakan	255.117.400,00	(255.117.400)	-
2				-
Jumlah		255.117.400,00	(255.117.400,00)	-

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp1.514.980.49
0,00*

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.514.980.490,00 dan Rp12.632.336,00.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar Kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang yang Belum Ditagihkan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.514.980.490,00 dan Rp12.632.336,00.

Rp1.514.980.490,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rangkuman Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 32. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai YMHD	1.514.980.490,00	
Jumlah		1.514.980.490,00	

C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rp0,00 Rangkuman Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 33. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0,00	Kwitansi UP Yang Belum Dipertanggungjawabkan
Jumlah		0,00	

C.4.4. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp250.000,00.

Dimuka Rp0,00 Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN.

Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa tanah/gedung yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Saldo nihil karena telah dilakukan jurnal balik awal tahun.

Rangkuman Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 34. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Sewa Ruang Dharmayukti Karini	0,00
Jumlah		0,00

C.4.5. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0,00 Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Rangkuman Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 35. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Uang Muka dari KPPN	0,00
Jumlah		0,00

C.4.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0,00 Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara hingga tanggal pelaporan.

C.5 Ekuitas

Ekuitas Rp24.067.264.262,00 Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24.067.264.262,00 dan Rp26.020.932.434,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas *62,00*

yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5.368.800,00 dan Rp3.965.300,00. *Rp5.368.800,00* Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBP Lainnya				
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	5.368.800,00	3.965.300,00	35,39
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		5.368.800,00	3.965.300,00	35,39
Total		5.368.800,00	3.965.300,00	35,39

Pendapatan dari pengelolaan dan pemanfaatan BMN berasal dari sewa atas Rumah Negara yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Banyuwangi.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.549.313.814,00 dan Rp7.186.874.307,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 37. Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	2.034.089.020,00	2.332.342.320,00	(12,79)
2	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Beban Pembulatan Gaji PNS	24.094,00	28.580,00	(15,70)
4	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(74,00)	(1.164,00)	(93,64)
5	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	174.384.620,00	194.471.604,00	(10,33)
6	Beban Tunj. Anak PNS	53.938.029,00	59.873.322,00	(9,91)
7	Beban Tunj. Struktural PNS	40.860.000,00	40.320.000,00	1,34
8	Beban Tunj. Fungsional PNS	78.685.000,00	3.534.700.000,00	(97,77)
9	Beban Tunj. PPh PNS	11.035.083,00	573.870.205,00	(98,08)
10	Beban Tunj. Beras PNS	107.978.220,00	118.189.440,00	(8,64)
11	Beban Uang Makan PNS	284.772.000,00	312.310.000,00	(8,82)
12	Beban Tunjangan Umum PNS	21.550.000,00	20.770.000,00	-3,76
13	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	0,00		100,00
14	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	895.147.820,00		100,00
15	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	4.537.693.542,00		100,00
16	Beban Gaji Pokok PPPK	205.753.600,00		100,00
17	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.620,00		100,00
18	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	16.141.200,00		100,00
19	Beban Tunjangan Anak PPPK	4.773.000,00		100,00
20	Beban Tunjangan Umum PPPK	13.120.000,00		100,00
21	Beban Tunjangan Beras PPPK	15.353.040,00		100,00
22	Beban Uang Makan PPPK	54.011.000,00		100,00
Total		8.549.313.814,00	7.186.874.307,00	18,96

Terdapat kenaikan beban pegawai pada periode pelaporan Tahunan Tahun 2025 sebesar 18,96% yang secara umum disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai dan PPPK pegawai yang berasal dari mutasi masuk ataupun baru pegawai dari Pengadilan Agama Banyuwangi.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp41.021.000,00 dan Rp33.159.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan pada periode Tahunan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 23,71%.

Tabel 38. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	41.021.000,00	33.159.000,00	23,71
Total		41.021.000,00	33.159.000,00	23,71

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.102.593.989,00 dan Rp1.316.614.456,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 39. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	926.837.260,00	1.105.933.488,00	(16,19)
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0,00	0,00	-
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	61.920.000,00	60.696.000,00	2,02
4	Beban Barang Operasional Lainnya	0,00	11.945.000,00	(100,00)
5	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700.000,00	0,00	-
6	Beban Bahan	300.000,00	0,00	-
7	Beban Langganan Air	16.920.250,00	17.085.720,00	(0,97)
8	Beban Langganan Telepon	1.286.418,00	1.449.248,00	(11,24)
9	Beban Sewa	77.842.200,00	119.505.000,00	(34,86)
8	Beban Langganan Listrik	16.787.861,00	0,00	-
Total		1.102.593.989,00	1.316.614.456,00	(16,26)

Penurunan beban barang dan jasa pada periode pelaporan Tahunan Tahun 2025 sebesar (16,26%) disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

1. Efisiensi anggaran pada pos beban barang operasional lainnya;

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp581.574.817,00 dan Rp626.342.773,00. *Beban Pemeliharaan* Rp581.574.817,00 merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	325.400.000,00	335.973.000,00	(3,15)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00	-
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	217.647.817,00	273.369.773,00	(20,38)
4	Beban persediaan untuk pemeliharaan	21.527.000,00		
Total		581.574.817,00	626.342.773,00	(7,15)

Terdapat penurunan beban pemeliharaan pada periode pelaporan Tahunan Tahun 2025 sebesar (7,15%) yang secara umum disebabkan oleh efisiensi pemeliharaan peralatan dan mesin dalam rangka menjaga performa aset lama agar tetap dalam keadaan yang optimal.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp24.593.963,00 dan Rp48.928.000,00. *Beban tersebut* merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	21.953.963,00	43.648.000,00	(49,70)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam kota	2.640.000,00	5.280.000,00	(50,00)
Total		24.593.963,00	48.928.000,00	(49,73)

Terdapat penurunan beban perjalanan dinas pada periode pelaporan Tahunan Tahun 2025 sebesar (49,73%). Hal tersebut disebabkan oleh pagu blokir pada Pengadilan Agama Banyuwangi.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp495.869.518,00
 Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp495.869.518,00 dan Rp509.158.180,00. Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 42. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	188.193.858,00	201.482.520,00	(6,60)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	307.675.660,00	307.675.660,00	0,00
Jumlah Penyusutan		495.869.518,00	509.158.180,00	(2,61)

Beban penyusutan dan amortisasi pada periode pelaporan Tahunan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (2.61%). Penurunan ini disebabkan oleh terdapat penghapusan aset Satuan Kerja Pengadilan Agama Banyuwangi di periode 31 Desember 2025.

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,00
 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 43. Rincian Beban Piutang tak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

Beban penyisihan piutang tak tertagih tidak mengalami penurunan maupun kenaikan pada periode pelaporan Tahunan Tahun 2025.

D.9 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Rp0,00

Pos Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 44. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
1	Nihil	0,00	0,00	100,00
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan defisit dari kegiatan non operasional periode Tahunan Tahun 2025.

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp0,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa pada 31 Desember 2025 dan 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp26.020.932.434,00 dan Rp35.897.57.798,00.

E.2 Surplus/Defisit LO

Defisit LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar (Rp10.782.100.248,00) dan (Rp9.717.111.416,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan (Rp40.114.959,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp8.828.432.076,00 Nilai transaksi antar entitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.828.432.076,00 dan (Rp119.348.989,00). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 45. Rincian Transaksi Antar Entitas*(dalam Rupiah)*

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.796.749.429,00	9.321.825.285,00
Diterima dari Entitas Lain	(12.866.853,00)	(3.965.300,00)
Transfer Keluar	0,00	-9.970.139.860,00
Transfer Masuk	44.549.500,00	40.775.750,00
Pengesahan Hibah Langsung		492.155.136,00
JUMLAH	8.828.432.076,00	-119.348.989,00

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Entitas (Rp1.953.668.172,00) Kenaikan dan penurunan ekuitas merujuk pada perubahan nilai ekuitas suatu entitas selama periode waktu tertentu, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti laba/rugi, investasi tambahan, penarikan modal, dan pembagian dividen. Pada Pengadilan Agama Banyuwangi dalam periode hingga 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Ekuitas sebesar (Rp1.953.668.172,00) dan (Rp9.876.575.364,00).

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp24.067.264.262,00 Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24.067.264.262,00 dan Rp26.020.932.434,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca pada satuan kerja Pengadilan Agama Banyuwangi yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2025.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pada periode 31 Desember 2025 tidak terdapat temuan BPK sehingga tidak ada tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI atas belanja pada Pengadilan Agama Banyuwangi.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banyuwangi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

- 1) Terdapat akun 111821 yaitu Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.563.000,00 yang merupakan pungutan pajak atas transaksi uang persediaan bulan Juni 2025 yang sudah disetor pada bulan Juli 2025;
- 2) Terdapat akun 218111 yaitu Utang Yang Belum Diterima Tagihannya sebesar Rp13.152.993,00 yang merupakan kwitansi belanja bulan Juni 2025 yang belum di-SPP-kan di bulan Juni 2025 juga tetapi pada bulan Juli 2025 sudah dimintakan SPP dan SPM serta telah terbit SP2Dnya;
- 3) Terdapat beberapa rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu sebagai berikut:

Sasa

No.	Kode Satker	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Desember
1	401369	Rekening Virtual	653244013691000	BPG 100 PA BANYUWANGI 401369	BRI CABANG BANYUWANGI	900041	TNP	30.000.000
2	401370	Rekening Virtual	653194013701000	BPG 100 PA BANYUWANGI 401370	BRI CABANG BANYUWANGI	900044	TNP	0
3	401370	Giro	000701001692309	RPL 100 PA BANYUWANGI UTK PDT	BANK RAKYAT INDONESIA	S-4821/MK.5/2015	TNP	584.356.500

- 4) Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor: Nomor SP DIPA-005.01.2.401369/2025 tanggal 2 Desember 2024 berjumlah sebesar Rp48.928.943.000,00 (empat

puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. DIPA Awal Nomor DIPA 005.01.2.401369/2025 tanggal 2 Desember 2024 (Dengan Pagu Total 48.928.943.000)
- b. Revisi DIPA ke 01 Nomor DIPA 005.01.2.401369/2025 tanggal 14 Januari 2025 (Dengan Pagu Total 48.928.943.000)
- c. Revisi DIPA ke 02 Nomor DIPA 005.01.2.401369/2025 tanggal 23 Februari 2025 (Dengan Pagu Total 48.928.943.000);
- d. Revisi DIPA ke 03 Nomor DIPA 005.01.2.401369/2025 tanggal 23 Maret 2025 (Dengan Pagu Total 48.928.943.000);
- e. Revisi DIPA ke 04 Nomor DIPA 005.01.2.401369/2025 tanggal 24 April 2025 (Dengan Pagu Total 48.928.943.000);
- f. Revisi DIPA ke 05 Nomor DIPA 005.01.2.401369/2025 tanggal 28 Mei 2025 (Dengan Pagu Total 51.279.744.000);
- g. Revisi DIPA ke 06 Nomor DIPA 005.01.2.401369/2025 tanggal 15 Juli 2025 (Dengan Pagu Total 51.279.744.000)

(5) Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus dan Jurnal Manual pada SAKTI Tahun 2024:

- a. Pada tanggal 2 Januari 2025 adalah jurnal balik akrual awal tahun atas:
 - Belanja uang makan PNS dan PPPK bulan Desember Tahun 2024 serta kekurangan tunjangan pejabat negara;
 - Beban langganan jasa pos, telepon, Listrik dan air atas pemakaian bulan Desember 2024;
 - Pendapatan diterima di muka atas sewa ruang dharmayukti karini;

(6) Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/ 2024 tanggal 02 Desember 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2025, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 01/SEK.W14-U/SK.KU.1.1.1/I/2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2025, Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 02/SEK.W14-U/SK.KU.1.1.1/2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2025, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 03/SEK.W14-U/SK.KU.1.1.1/I/2025 tentang

Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2025, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 04/SEK.W14-U/SK.KU.1.1.1/I/2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2025, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 07/SEK.W14-U/SK.KU.1.1.1/I/2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah Tingkat Koordinator Wilayah Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2025, telah menunjuk:

Kuasa Pengguna Anggaran	: SHOHEH, S.H.
Pejabat Pembuat Komitmen	: TATANG WINARTO, S.Kom.
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: MUNDORIN, S.H.
Bendahara Pengeluaran	: DESKA LENITA, A.Md.
Bendahara Penerimaan	: ZARA SABRINA ANGGAWISATA, A.Md.
Staf Pengelola Keuangan	: YUSUF BACHTIAR, S.E.I.
Staf Pengelola Keuangan	: FIRMAN YULIANTO, A.Md.